

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan lelang dan penjualan langsung di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Pasal 24 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung di Kejaksaan Negeri Kota Kediri serta untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hukum bagi pembeli barang lelang dan penjualan langsung yang tidak mengetahui kondisi objek yang akan dibeli. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi Pasal 24 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam pelaksanaan pelelangan telah sesuai dengan yang diperinci dalam Pedoman Nomor 3 Tahun 2022. Namun, dalam pelaksanaan penjualan langsung terdapat ketidaksesuaian. Dimana ketidaksesuaian terdapat dalam kurangnya klausula pengumuman serta pengurusan surat kepemilikan barang yang telah dibeli. Disamping itu, dalam pelaksanaan pelelangan dan penjualan langsung, terdapat perlindungan hukum preventif dan represif bagi pembeli. Perlindungan hukum represif dari penjualan langsung terdapat pada Pedoman Nomor 3 tahun 2022 terkait klausula pengumuman pelaksanaan. Sementara untuk pelelangan tercantum dalam Pasal 42 Vendu Reglement yang berisi penerimaan risalah lelang bagi yang memerlukan. Perlindungan hukum represif dalam penjualan langsung tercantum dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung terkait pengurusan surat kepemilikan untuk kendaraan. Sedangkan untuk pelelangan tercantum dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020

tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang menyatakan bahwa pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan tidak dapat dibatalkan, serta pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana ketika timbul sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non-litigasi.

Kata Kunci : Lelang, Penjualan Langsung, Pengumuman, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This thesis examines the implementation of auctions and direct sales at the District Attorney's Office of Kediri City. The purpose of this study is to analyze the implementation of Article 24 of the Indonesian Prosecutor's Regulation Number 10 of 2019 concerning Auctions and Direct Sales at the District Attorney's Office of Kediri City and to analyze in depth the legal protection for buyers of auctioned and direct sale goods who do not know the condition of the auction object or direct sale. This research method uses empirical legal research. The results of this study explain that the implementation of Article 24 of the Indonesian Prosecutor's Regulation Number 10 of 2019 concerning Auctions and Direct Sales at the District Attorney's Office of Kediri City in the implementation of auctions is in accordance with what is detailed in Guideline Number 3 of 2022. However, in the implementation of direct sales there is a discrepancy. Where the discrepancy is found in the lack of an announcement clause and the management of the ownership letter of the goods that have been purchased. In addition, in the implementation of auctions and direct sales, there are preventive and repressive legal protections for buyers. Repressive legal protection from direct sales is contained in Guideline Number 3 of 2022 regarding the implementation announcement clause. Meanwhile, the auction is listed in Article 42 of the Vendu Reglement which contains the receipt of auction minutes for those in need. Repressive legal protection in direct sales is listed in Article 24 paragraph (4) of the Indonesian Prosecutor's Regulation Number 10 of 2019 regarding Auctions and Direct Sales related to the management of ownership letters for vehicles. As for the auction, it is stated in Article 25 of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 213/PMK.06/2020 concerning guidelines for the implementation of auctions which states that auctions that have been carried out in accordance with regulations cannot be canceled, and in the

Consumer Protection Act where when a dispute arises it can be resolved through litigation or non-litigation.

Keywords : *Auction, Direct Selling, Announcement, Legal Protection*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	14
3. Tujuan Penelitian.....	14
4. Manfaat Penelitian.....	15
5. Penelitian Terdahulu	15
6. Metode Penelitian.....	23
7. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
1. Penegakan Hukum	30
2. Perlindungan Hukum	36
3. Lelang dan Penjualan Langsung.....	42

BAB III IMPLEMENTASI PASAL 24 PERATURAN KEJAKSAAN RI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PELELANGAN DAN PENJUALAN LANGSUNG DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI	51
1. Implementasi Pasal 24 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung di Kejaksaan Negeri Kota Kediri	51
2. Perlindungan hukum bagi pembeli barang lelang atau penjualan langsung yang tidak mengetahui kondisi objek lelang atau penjualan langsung	66
BAB IV PENUTUP	93
1. Kesimpulan	93
2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	106